

KEGAGALAN GAYA MILITER DI RANAH SIPIL

29 Juli 2026

Oleh: H. Moch Ali Bin Dachlan

Setelah Presiden Prabowo menjadi presiden Indonesia, yang bersangkutan mencoba mengelola negara ini dalam bayangan gaya militer. Hal tersebut dapat dipahami karena yang bersangkutan pernah sekolah militer dan bekerja dalam lingkungan militer.

Dimulai dengan retreat di Sekolah Militer di Magelang, semua Kepala Daerah dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Mereka diharuskan gunakan uniform militer, berbaris gaya militer, diharuskan disiplin seperti murid murid sekolah militer.

Bukan hanya Kepala Daerah, menteri menteri, sekda sekda juga dilakukan retreat gaya militer. Mereka mendapatkan gaya hidup dalam sistem pendidikan militer. Presidennya adalah pensiunan militer yang berjiwa militer, walaupun SBY juga berlatar belakang militer, tapi memimpin negara tetap bergaya sipil.. Mengapa ?. Karena SBY sadar, bahwa reformasi 1998 adalah puuncak dari penjungkir balikan terhadap sebuah pemerintahan Orba yang bergaya militer.

Beberapa minggu lalu, calon kariawan Koperasi Desa juga dilatih dalam gaya militer. Beberapa orang tewas karena tidak mampu ikut latihan gaya militer. Sejumlah menteri, wakil menteri, sejumlah gubernur, Bupati dan wali kota yang telah ikuti retreat gaya militer, akhirnya tertangkap tangan karena terlibat dalam kasus kasus korupsi. Artinya, manajemen pemerintahan sipil sangat berbeda dengan manajemen yang berlaku dalam kalangan militer, walaupun dikalangan militer juga ternyata banyak juga yang terlibat praktik korupsi.

Gaya militer masih terlihat pada praktik pemerintahan sipil maupun pendidikan kita. Misalnya apel pagi, laporan kepada pimpinan upacara, gaya upacara bendera, menjalar ke sekolah sekolah. Hasilnya ?.

Gaya Militer Vs Character Building

Penulis yakin gaya militer dalam menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap personalia yang menjalankannya. Bagaimana pun juga gaya militer hanya berupa gerakan fisik. Tindakan badan dalam bersikap terhadap atasan ke bawahan. Sikap kerja yang seolah-olah menggambarkan disiplin, ketegasan dan kewibawaan.

Padahal jauh lebih dari itu personalia pemerintahan dan birokrasi bertumpu pada pembangunan karakter. Personalia pemerintahan dan birokrasi lebih bertumpu pada persoalan karakter seseorang individu atau kelompok. Pada saat yang sama pembangunan karakter bukanlah pembangunan yang dapat didapatkan lewat latihan militer sebulan dua bulan atau pun setahun dua tahun.

Melainkan didapatkan dari pendidikan jangka menengah dan panjang. Pendidikan karakter didapatkan sejak dari usia dini. Itulah mengapa pemerintah menggalakan pendidikan usia dini di Indonesia yang massif sejak 10 -15 tahun terakhir. Seorang anak didik usia dini dibiasakan berkata jujur, di didik untuk disiplin, diajarkan sikap sopan santun dan seterusnya dalam rangka membangun karakter. Membangun mentalitas positif bagi kehidupannya kelak ketika dewasa.

Jikalau sejak dini pembangunan karakter pada anak didik berhasil maka kemungkinan besar ke depannya ketika memegang amanah dari masyarakat, bangsa dan negara maka karakter baiknya yang dominan. Sebaliknya jika pembangunan karakternya tidak berhasil, maka bisa jadi seseorang ketika memegang amanah menjadi tidak dapat menjalankannya. Dengan demikian pendidikan karakter tidak bisa dibuat-buat dalam waktu singkat melainkan berupa proses sedari awal pendidikan.

Berikutnya yang terlihat memberikan dampak baik atau buruk pada karakter seseorang adalah lingkungan atau pun system. Jika lingkungan atau system yang baik maka orang dengan karakter jahat sekalipun akan dipaksa menjadi baik. Sebaliknya orang baik sekalipun jika sistemnya buruk atau rusak maka akan hanyut oleh kondisi atau keadaan.

Di Indonesia system pengawasan atau kontrol sudah dibuat sedemikian rupa. Untuk pengawas birokrasi keuangan dibuat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada juga inspektorat. Keduanya bertugas mengawasi jalannya birokrasi. Hanya saja inspektorat pengawasan internal sedangkan BPK eksternal. Pemerintah diawasi oleh yudikatif. Lembaga kepolisian ada lembaga pengontrol. KPK ada dewan pengawasnya. KY mengawasi para hakim dan seterusnya.

Intinya system di Indonesia telah dilengkapi dengan pelaksana kerja dan kepengawasan sekaligus. Dengan demikian dapat dikatakan sistemnya sudah memenuhi syarat sebagai system yang baik. Sistem dengan personalia yang lengkap.

Hanya saja di Indonesia yang nampak dominan bermasalah adalah mentalitas. Dalam sebuah siaran TV swasta nasional tokoh seperti Prof Salim Said mengakui bahwa pejabat-pejabat di Indonesia merupakan pejabat-pejabat pelanggar sumpah. Artinya janji hati yang merupakan bagian dari aktivitas mental tidak berjalan seiring sejalan dengan perkataannya.

Dalam kondisi system yang baik di mana telah dilengkapi dengan berbagai macam badan atau pun institusi pengawas tetap saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang. Variable mentalitas sekali lagi menjadi faktor yang memberikan pengaruh. Itulah mengapa pembangunan mental merupakan program yang kompleks. Di satu sisi harus menyediakan pendidikan yang baik sejak dini dan terus berkelanjutan. Di sisi lain mentalitas yang rusak pada salah satu komponen pemerintahan dan atau birokrasi harus segera diamputasi, dipotong atau harus segera diselesaikan agar tidak menjalar, sehingga tidak mengalami pembesaran yang berpotensi merusak sebagian besar system yang sudah susah payah dibangun.

Sekarang sudah ditemukan vital point pada kehidupan kebangsaan Indonesia, di mana mental merupakan persoalan yang tidak berhasil dijaga tetap baik. Sedangkan mentalitas suatu bangsa merupakan energy yang berasal dari sumber metafisik. Misalnya Jepang dengan mentalitas setia pada kekaisaran. Dari sini masyarakat Jepang mengambil kekuatan untuk bangkit dan berkomitmen menjadi “pemimpin” Asia, sehingga dapat dilihat bagaimana Jepang mampu menjadi produsen barang-barang bernilai tinggi seperti kendaraan roda empat dan roda dua yang diekspor ke seluruh dunia.

Di balik peristiwa kemampuan Jepang mengeksport kendaraan ke seluruh dunia, ada mentalitas yang bersumber dari energy setia pada raja. Lalu membentuk system yang kemudian sistemnya itu berjalan sesuai dengan harapan yang dikehendaki. Dari sini dapat dilihat semangat atau spirit masyarakat Jepang tidak semata-mata datang dari agama melainkan dari kesetiaan pada raja.

Di Indonesia bagaimana pun agama telah menjadi pengakuan yang dipeluk erat oleh masyarakatnya. Pada saat yang sama muncul keanehan yang tidak dapat dinalar dengan mudah. Agama begitu semarak, namun tidak memberikan pengaruh signifikan pada mentalitas masyarakatnya. Agama mengajarkan kejujuran, amanah, berbuat baik dan seterusnya, tetapi ketika hal itu dituntut untuk dilakukan pada praktik kekuasaan dan birokrasi seringkali gagal. Buktinya korupsi dan penyimpangan-penyimpangan sudah menjadi peristiwa sehari-hari.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk memperbaiki Indonesia adalah dengan menunjuk pemimpin tertinggi yang setidaknya tidak mempunyai riwayat skandal atau beban masa lalu. Semakin sedikit skandal atau masalah dan beban masa lalu lainnya maka kemungkinan untuk dapat menyelesaikan banyak persoalan yang kompleks masyarakat, bangsa dan Negara dapat dilakukannya. Kedua untuk mendapatkan pemimpin berkualitas tinggi harusnya diusahakan untuk memperbaiki system pemilu terkait dengan pendanaan. Dapat pula mengubah model pemilihan dengan permusyawaratan sehingga yang memilih pemimpin tertinggi tim formatur yang dibentuk dari wilayah-wilayah se Indonesia.